



KATALOG BPS : 4103.71

# INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT PROVINSI SULAWESI UTARA 2007

<https://sulut.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

# **INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT PROVINSI SULAWESI UTARA 2007**

<b>ISBN</b>	979 488 522 3
<b>Nomor Publikasi</b>	71522.0702
<b>Katalog BPS</b>	4103.71
<b>Ukuran Buku</b>	21,59 X 29,7 cm
<b>Jumlah Halaman</b>	29 halaman

**Naskah**

**Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Sulawesi Utara**

**Gambar Kulit**

**Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Sulawesi Utara**

**Diterbitkan oleh**

**Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara**

**Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya**

# KATA PENGANTAR

Optimalisasi potensi daerah pada hakekatnya akan bermuara pada tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Karena masyarakat adalah subjek sekaligus menjadi objek pembangunan. Untuk melihat seberapa jauh pencapaian program pembangunan dalam wacana kesejahteraan rakyat, maka BPS Provinsi Sulawesi Utara sebagai penyedia data, menerbitkan publikasi berjudul **Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Utara 2007**.

Publikasi ini merupakan publikasi tahunan BPS Provinsi Sulawesi Utara yang menyajikan data tentang tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat di Provinsi Sulawesi Utara antar waktu, dan melihat perbandingan antar kabupaten/kota. Data untuk analisis indikator kesejahteraan rakyat bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2006. Data ketenagakerjaan tidak ditampilkan dalam publikasi tahun ini karena sudah ditampilkan dalam publikasi khusus ketenagakerjaan yang diterbitkan oleh BPS Provinsi Sulawesi Utara.

Dengan terbitnya buku ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada semua pihak yang membutuhkan. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam mewujudkan publikasi ini, disampaikan terima kasih.

Manado, Desember 2007  
Kepala Badan Pusat Statistik  
Provinsi Sulawesi Utara,



Drs. Jasa Bangun, MSi.  
NIP. 340005025

# DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
I. KEPENDUDUKAN	1
1.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk	1
1.2 Persebaran dan Kepadatan Penduduk	2
II. KESEHATAN	5
2.1 Derajat dan Status Kesehatan Penduduk	5
2.2 Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan	6
III. PENDIDIKAN	10
3.1 Tingkat Pendidikan	10
3.2 Tingkat Partisipasi Sekolah	13
3.3 Fasilitas Pendidikan	14
IV. TARAF DAN POLA KONSUMSI	16
4.1 Perkembangan Tingkat Kesejahteraan	16
4.2 Pengeluaran Rumah Tangga	16
V. PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN	19
5.1 Kualitas Rumah Tinggal	20

# DAFTAR TABEL

	Halaman
<b>KEPENDUDUKAN</b>	
1.1 Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk Sulawesi Utara	1
1.2 Persentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk Tahun 2006	3
1.3 Komposisi Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan Tahun 2003 – 2006	4
<b>KESEHATAN</b>	
2.1 Rata-rata Lama Sakit per Kabupaten/Kota Tahun 2005 – 2006	6
2.2 Persentase Penolong Persalinan Pertama Bayi Tahun 2005 - 2006	7
2.3 Persentase Penduduk yang Berobat Sendiri menurut Jenis Pengobatan yang Digunakan menurut Kabupaten/Kota tahun 2005 - 2006	8
2.4 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan menurut Tempat Berobat tahun 2005 - 2006	9
<b>PENDIDIKAN</b>	
3.1 Angka Melek Huruf per Kabupaten/Kota tahun 2006	11
3.2 Persentase Penduduk 10 tahun ke Atas menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan tahun 2006	13
3.3 Angka Partisipasi Sekolah menurut Usia Sekolah tahun 2006	14
3.4 Rasio Murid-Guru dan Guru-Sekolah tahun 2005/2006	15
<b>TARAF DAN POLA KONSUMSI</b>	
4.1 Pengeluaran Rata-rata (Rp) Nominal dan Persentase Pengeluaran Makanan dan Bukan Makanan Sebulan yang Lalu	17
<b>PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN</b>	
5.1 Persentase Rumahtangga menurut Indikator Kualitas dan Fasilitas Perumahan tahun 2005 – 2006	20

# DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1 Angka Beban Ketergantungan tahun 2003 – 2006	4
2 Persentase Penolong Persalinan Pertama Bayi di Sulawesi Utara, 2006	7
3 Angka Buta Huruf per Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, 2006	12
4 Distribusi Persentase Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Makanan dan Non Makanan menurut Kabupaten/Kota Sulawesi Utara, 2005	18
5 Persentase Rumahtangga dengan Luas Lantai Rumah < 20 m <sup>2</sup> , 2006	21
6 Persentase Rumahtangga yang Berlantai Tanah, 2006	22

# I. KEPENDUDUKAN

Masalah kependudukan yang antara lain meliputi jumlah, komposisi dan distribusi penduduk merupakan salah satu masalah yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi tetapi dapat juga menjadi beban dalam proses pembangunan nasional jika berkualitas rendah. Oleh sebab itu untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional, dalam menangani permasalahan penduduk pemerintah tidak saja mengarahkan pada upaya pengendalian jumlah penduduk tapi juga menitik beratkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Disamping itu program perencanaan pembangunan sosial di segala bidang harus mendapat prioritas utama yang berguna untuk peningkatan kesejahteraan penduduk.

## 1.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Pada tahun 2000 jumlah penduduk Sulawesi Utara yang bertempat tinggal tetap sudah mencapai 2,044 juta jiwa. Meskipun secara absolut jumlah penduduk terus bertambah namun laju pertumbuhan relatif mengalami penurunan diantaranya melalui program KB. Tingkat pertumbuhan yang tinggi secara langsung akan menambah jumlah penduduk usia muda, dan dapat menimbulkan permasalahan baru.

**Tabel 1.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Sulawesi Utara**

Tahun	Jumlah Penduduk (juta)	Laju pertumbuhan
(1)	(2)	(3)
1980	1.973	1.52
1990	1.998	1.32
2000	2.044	

Sumber : Sensus Penduduk 1980, 1990, 2000

Secara absolut jumlah penduduk Sulawesi Utara terus bertambah setiap tahunnya, namun secara relatif laju pertumbuhan penduduk terus menurun. Selama

periode 1980-1990 laju pertumbuhan penduduk Sulawesi Utara sudah dibawah 2 persen, dengan jumlah penduduk tercatat sebanyak 1,973 juta jiwa pada tahun 1980 dan meningkat menjadi 1,998 juta jiwa pada tahun 1990. Sepuluh tahun kemudian jumlah penduduk Sulawesi Utara sudah mencapai 2,004 juta jiwa dengan rata-rata pertumbuhan penduduk pertahun 1,32 persen antara tahun 1990 sampai dengan tahun 2000. Masalah kependudukan bisa menjadi masalah yang serius bagi suatu daerah. Oleh karena itu, upaya mengendalikan pertumbuhan penduduk disertai dengan upaya peningkatan kesejahteraan penduduk harus merupakan suatu upaya yang berkesinambungan dengan program pembangunan yang sedang dan akan terus dilaksanakan.

Hasil Sensus Penduduk tahun 2000 sudah menyajikan 5 Kabupaten/ kota dimana Gorontalo sudah terpisah dengan Sulawesi Utara dengan membentuk satu Provinsi sendiri. Rata-rata tingkat pertumbuhan pertahun pada periode 1990-2000 per Kabupaten/Kota sangat bervariasi. Berdasarkan hasil profil Kependudukan Sulawesi Utara tahun 2000 pertumbuhan penduduk terendah terjadi di Kabupaten Sangihe Talaud yaitu sebesar 0.05 persen sedangkan yang tertinggi terdapat di Kota Bitung yaitu sebesar 2.96 persen. Selain kota Bitung beberapa Kabupaten/Kota mengalami laju pertumbuhan penduduk cukup tinggi diatas 1 persen, yaitu kota Manado (1.57 persen) dan Kabupaten Bolaang Mongondow (1.48 persen).

## **1.2. Persebaran dan Kepadatan Penduduk**

Persebaran penduduk antara Kabupaten dan Kota tampak masih sangat timpang, sehingga kepadatannya masih belum merata. Kepadatan penduduk biasanya terpusat di daerah perkotaan yang umumnya memiliki segala fasilitas yang dibutuhkan oleh penduduk sehingga mengundang penduduk wilayah kabupaten untuk bekerja didaerah kota. Masalah yang sering timbul yang diakibatkan oleh kepadatan penduduk adalah masalah perumahan, kesehatan, dan keamanan. Oleh karena itu, distribusi penduduk harus menjadi perhatian khusus pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, setidaknya pembangunan yang dilaksanakan di daerah-daerah kota harus berkaitan dengan daya dukung lingkungan dan dapat menciptakan lapangan kerja yang luas bagi penduduk setempat, sehingga tidak menimbulkan urbanisasi.

Persebaran penduduk dari tahun ke tahun masih terkonsentrasi di kota, dengan luas hanya 3,97 persen dari seluruh luas wilayah daratan Sulawesi Utara, dihuni sekitar 30,91 persen penduduk Sulawesi Utara.

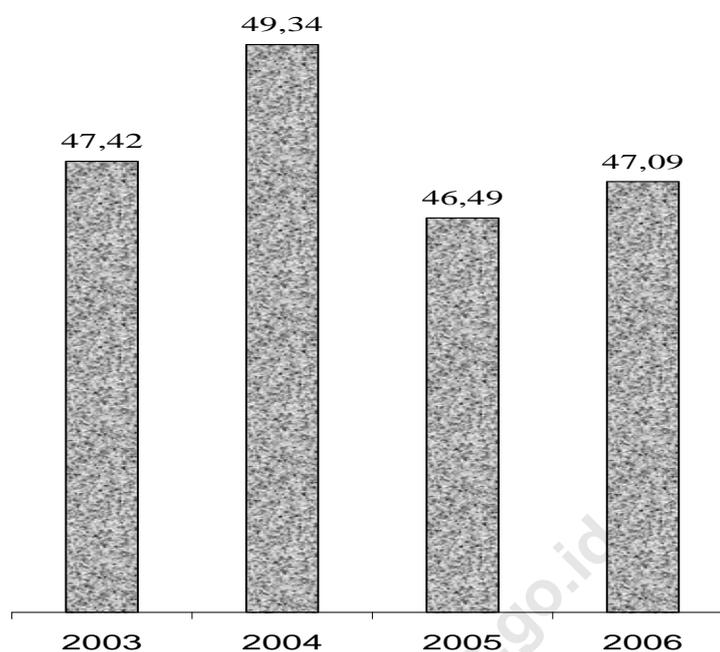
**Tabel 1.2 Persentase dan Kepadatan Penduduk Sulawesi Utara Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2006**

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah	Kepadatan (Jiwa/Km)
(1)	(2)	(3)	(4)
Bolaang Mongondow	485.222	8.358,04	58,05
Minahasa	293.081	1.117,15	262,35
Sangihe	191.631	936,25	204,68
Talaud	74.660	1.250,92	59,68
Minahasa Selatan	276.928	2.079,14	133,19
Minahasa Utara	170.340	1.024,39	166,28
Manado	417.654	158,82	2.629,73
Bitung	169.243	338,08	500,60
Tomohon	81.882	114,20	717,01
Sulawesi Utara	2.160.641	15.376,99	140,51

Sumber: Sulawesi Utara dalam Angka 2006

Salah satu dampak keberhasilan pembangunan kependudukan diantaranya akan terlihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur. Bila proporsi penduduk usia tidak produktif semakin rendah (kelompok umur 0-14 tahun dan kelompok umur 65 tahun atau lebih ) maka angka beban ketergantungan akan semakin rendah. Semakin rendah angka beban ketergantungan akan memberikan kesempatan bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya. Pada tahun 2006, angka beban ketergantungan sebesar 47,09 yang berarti setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 47 penduduk usia tidak produktif.

Gambar 1. Angka Beban Ketergantungan  
Tahun 2003-2006



Struktur umur penduduk Sulawesi Utara berada pada tahap transisi antara penduduk muda menjadi penduduk tua. Hal ini karena proporsi penduduk mudanya (dibawah 15 tahun) kurang dari 30 persen, dan proporsi penduduk tuanya (usia 65+) masih kurang dari 6 persen. Proporsi penduduk usia 0-14 tahun ada sebanyak 26,28 persen pada tahun 2005 turun menjadi 26,06 persen pada tahun 2006. Sedangkan untuk penduduk usia 65 tahun atau lebih, tahun 2005 sebesar 5,45 persen dan naik setengah persen menjadi 5,95 persen pada tahun 2006.

**Tabel 1.3 Komposisi Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan  
Tahun 2003-2006**

Tahun	0 - 14	15 – 64	65 +	Angka Beban Ketergantungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2003	27.35	67.74	4.91	47.42
2004	27.88	66.95	5.17	49.34
2005	26.28	68.26	5.45	46.49
2006	26,06	68,04	5,95	47,09

Sumber : Susenas

## 2. KESEHATAN

Salah satu aspek penting kesejahteraan adalah kualitas fisik penduduk yang dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk. Indikator utama yang digunakan untuk melihat derajat kesehatan penduduk adalah angka kematian bayi dan angka harapan hidup. Selain itu aspek penting lainnya yang turut mempengaruhi kualitas fisik penduduk adalah status kesehatan antara lain diukur melalui angka kesakitan dan status gizi. Sementara untuk melihat gambaran tentang kemajuan upaya peningkatan dan status kesehatan masyarakat dapat dilihat dari penolong persalinan bayi. Ketersediaan sarana kesehatan dan jenis pengobatan yang dilakukan. Oleh karena itu usaha untuk meningkatkan dan memelihara mutu pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan dan sarana prasarana dalam bidang medis termasuk ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat perlu mendapat perhatian utama.

### 2.1 Derajat dan Status Kesehatan Penduduk

Status kesehatan penduduk memberikan gambaran mengenai kondisi kesehatan penduduk. Salah satu indikatornya dapat dilihat dari rata-rata lama sakit atau lamanya terganggu aktifitas sehari-hari. Di Sulawesi Utara rata-rata lamanya sakit menurun dari tahun 2005 ke tahun 2006, yaitu dari 5,54 hari menjadi 5,26 hari. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat untuk memelihara kesehatannya semakin membaik. Rata-rata lama sakit per kabupaten/kota juga mengalami penurunan dalam periode yang sama. Penurunan terbesar terjadi di Kota Tomohon dan Kabupaten Minahasa Utara, sampai lebih dari 2 hari.

**Tabel 2.1 Rata-rata Lama Sakit Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2005-2006**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Rata – rata Lama Sakit</b>	
	<b>2005</b>	<b>2006</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
Bolaang Mongondow	5,38	3,94
Minahasa	6,42	5,45
Kep. Sangihe	5,97	4,16
Kep. Talaud	5,11	4,03
Minahasa Selatan	5,21	5,05
Minahasa Utara	5,38	3,20
Manado	5,36	4,14
Bitung	5,26	4,15
Tomohon	6,26	3,73
<b>Sulawesi Utara</b>	<b>5,54</b>	<b>5,26</b>

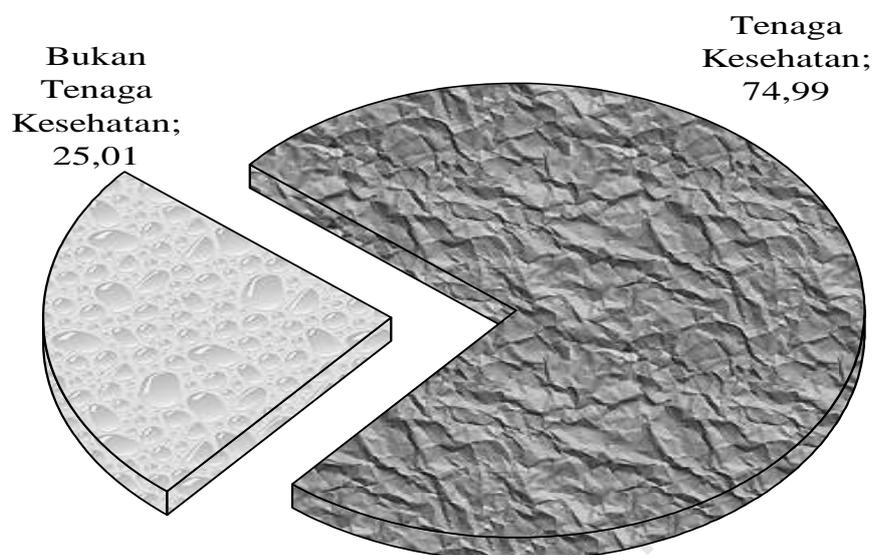
Sumber : Susenas

## **2.2 Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan**

Untuk mewujudkan peningkatan derajat dan status kesehatan penduduk, ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas dan sarana kesehatan merupakan salah satu faktor penentu utama. Hal yang penting lainnya adalah ketersediaan pelayanan kesehatan reproduksi yang diupayakan agar persalinan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang profesional (dokter, bidan dan tenaga kesehatan lainnya).

Pada tahun 2005 di Sulawesi Utara terdapat 83,75 persen persalinan pertama yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kemudian menurun pada tahun 2006 menjadi 74,99 persen. Penurunan terjadi pada tenaga kesehatan lainnya (selain dokter dan bidan) yaitu dari 1,72 persen tahun 2005 turun menjadi 1,42 persen tahun 2006. Namun untuk tenaga kesehatan bidan juga mengalami penurunan dari 55,40 persen tahun 2005 menjadi 52,56 persen tahun 2006. Begitu juga dengan tenaga kesehatan dokter turun dari 26,63 persen menjadi 21,01 persen.

**Gambar 2. Persentase Penolong Persalinan Pertama Bayi di Sulawesi Utara, 2006**



Sebaliknya secara umum persalinan pertama yang dibantu oleh bukan tenaga kesehatan dalam hal ini dukun, keluarga dan famili lainnya, pada tahun 2006 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2005 yaitu dari 16,25 persen naik menjadi 25,01 persen .

**Tabel 2.2 Persentase Penolong Persalinan Pertama Bayi tahun 2005-2006**

Indikator	2005	2006
(1)	(2)	(3)
<b>Tenaga Kesehatan</b>	<b>83,75</b>	<b>74,99</b>
Dokter	26,63	21,01
Bidan	55,40	52,56
Lainnya	1,72	1,42
<b>Bukan tenaga kesehatan</b>	<b>16,25</b>	<b>25,01</b>
Dukun tradisional	14,72	23,07
Family/keluarga	1,48	1,87
Lainnya	0,04	0,07

Sumber : Susenas

Penduduk yang mengalami gangguan kesehatan pada umumnya melakukan upaya pengobatan, baik dengan berobat sendiri, maupun berobat jalan. Selama periode 2005-2006 di Sulawesi Utara penduduk yang berobat sendiri, pengobatan secara modern menjadi pilihan utama. Hal ini terlihat pada persentase penduduk yang berobat dengan menggunakan pengobatan modern sangat tinggi dibandingkan dengan menggunakan obat tradisional dan lainnya, yaitu sebesar 87,54 persen di tahun 2006 (Tabel 2.3). Hal ini berarti terjadi kenaikan dibanding tahun 2005, dimana pemakaian obat modern sebesar 84,75 persen. Sementara penduduk yang menggunakan pengobatan lainnya turun dari 11,45 persen menjadi 7,95 persen. Sementara bila dilihat per kabupaten/kota, pada umumnya mengalami peningkatan dalam pemakaian obat modern dari tahun 2005 ke tahun 2006.

**Tabel 2.3 Persentase Penduduk yang Berobat Sendiri menurut Jenis Pengobatan yang Digunakan menurut Kabupaten/Kota**

Kabupaten/Kota	Tradisional		Modern		Lainnya	
	2005	2006	2005	2006	2005	2006
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bolaang Mongondow	21,44	24,42	91,76	91,69	9,46	7,50
Minahasa	19,88	18,44	85,08	90,15	10,38	6,54
Minahasa Selatan	32,06	42,42	75,21	87,55	12,51	6,56
Minahasa Utara	30,87	27,61	85,32	85,51	11,94	8,27
Sangihe	37,50	32,73	79,97	66,97	11,98	24,36
Talaud	40,62	21,24	58,15	85,37	20,00	12,09
Manado	13,76	17,94	83,97	84,08	16,48	4,09
Tomohon	12,25	11,22	92,08	96,02	2,85	3,26
Bitung	21,95	14,98	84,21	90,55	7,34	5,76
Sulawesi Utara	23,10	23,26	84,75	87,54	11,45	7,95

Sumber : Susenas

Dalam hal tempat berobat bagi penduduk yang berobat jalan, yang paling menonjol pada tahun 2005 adalah praktek dokter, puskesmas/pustu, dan klinik KIA/balai pengobatan/poliklinik yang besarnya masing-masing sekitar 32 persen, 32 persen, dan 19 persen. Pada tahun 2006 terjadi sedikit perubahan, yaitu ke praktek dokter, puskesmas/pustu, dan petugas kesehatan/praktek nakes. Jika persentase ke praktek dokter mengalami penurunan dari sekitar 32 persen menjadi 27 persen, maka yang berobat ke puskesmas/pustu meningkat dari sekitar 32 persen menjadi 41 persen dalam periode 2005-2006. demikian juga yang berobat ke petugas kesehatan/praktek nakes meningkat tajam dari kurang dari 1 persen menjadi sekitar 13 persen dalam periode yang sama. Sebaliknya yang paling sedikit diminati penduduk adalah praktek tradisional/batra/dukun yang tidak mencapai 1 persen pada tahun 2005 maupun 2006.

**Tabel 2.4 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan menurut Tempat Berobat Tahun 2005-2006**

Tempat berobat	2005	2006
(1)	(2)	(3)
Rumah Sakit Pemerintah	7,88	8,79
Swasta	6,00	5,76
Praktek Dokter	31,70	27,31
Puskesmas/Pustu	31,94	41,33
Klinik KIA/Balai Pengobatan/ Poliklinik	19,29	-
Petugas kesehatan/ Praktek Nakes	0,63	12,73
Praktek Tradisional/Batra/ Dukun	0,58	0,93
Lainnya	1,97	3,14

Sumber : Susenas

### **3. PENDIDIKAN**

Pendidikan merupakan proses pemberdayaan peserta didik sebagai subjek sekaligus objek dalam membangun kehidupan yang lebih baik. Mengingat pendidikan sangat berperan sebagai faktor kunci dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka pembangunan di bidang pendidikan meliputi pembangunan secara formal maupun non formal. Pembangunan di bidang pendidikan memerlukan peran serta yang aktif tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga dari masyarakat karena belum semua anak Indonesia dapat menikmati kesempatan pendidikan dasar, antara lain karena faktor kemiskinan keluarga. Upaya untuk menumbuhkan, meningkatkan dan mengembangkan kepedulian masyarakat dalam pembangunan pendidikan antara lain terlihat dari usaha Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA), yang menghimpun dana dari masyarakat untuk membantu keluarga miskin agar anak mereka tetap memperoleh pendidikan.

Titik berat pendidikan formal adalah peningkatan mutu pendidikan dan perluasan pendidikan dasar. Selain itu, ditingkatkan pula kesempatan belajar pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Untuk mencapai sasaran tersebut, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah, misalnya dengan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, perbaikan kurikulum, bahkan semenjak tahun 1994 pemerintah juga telah melaksanakan program wajib belajar 9 tahun sebagai peningkatan dari program wajib belajar 6 tahun. Dengan semakin lamanya usia wajib belajar ini diharapkan tingkat pendidikan anak semakin membaik, dan tentunya akan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan penduduk

#### **3.1 Tingkat Pendidikan**

Kemampuan baca-tulis penduduk dewasa merupakan ukuran yang sangat mendasar dari tingkat pendidikan, yang tercermin dari data angka melek huruf, yaitu persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang dapat membaca huruf latin dan huruf lainnya. Penduduk yang dapat membaca huruf latin dan huruf lainnya di Sulawesi Utara pada tahun 2006 sudah mencapai 99,00 persen, sisanya sebanyak 1 persen adalah penduduk usia 10 tahun ke atas yang tidak dapat membaca atau buta huruf.

**Tabel 3.1 Angka Melek Huruf Menurut Kabupaten/Kota tahun 2006**

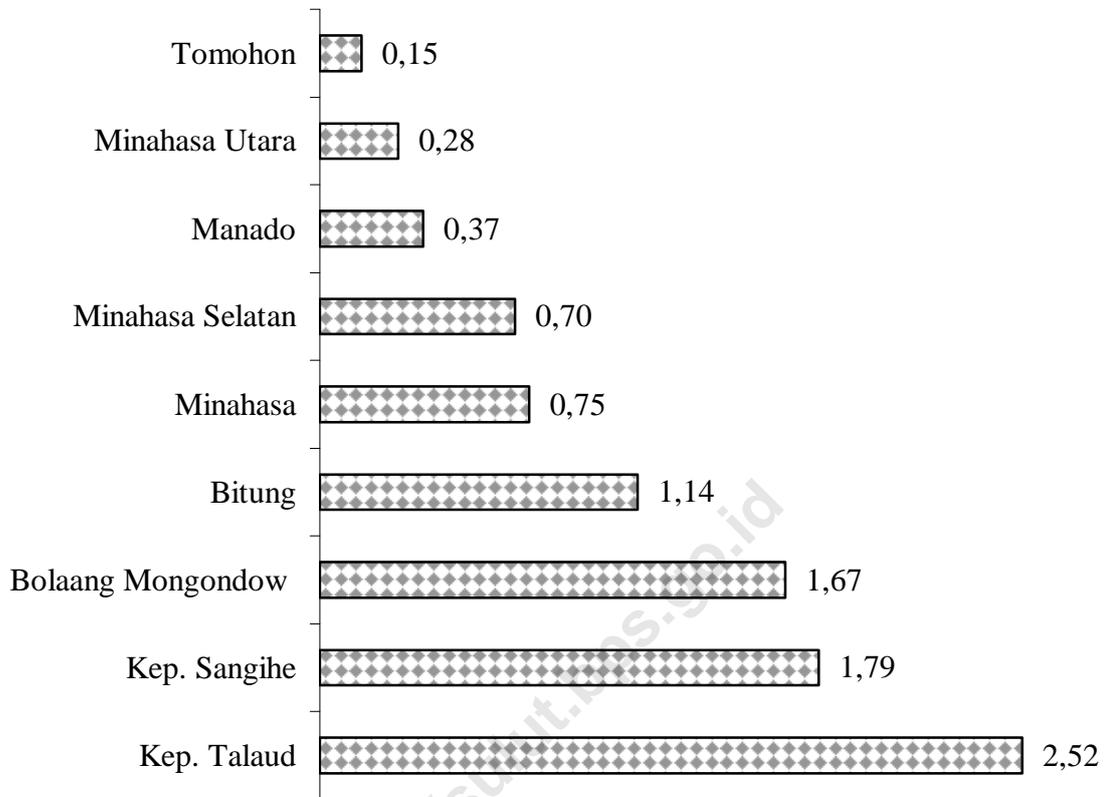
Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Bolaang Mongondow	98,95	97,65	98,33
Minahasa	99,19	99,32	99,25
Sangihe	97,77	98,66	98,21
Talaud	97,30	97,66	97,48
Minahasa Selatan	99,15	99,46	99,30
Minahasa Utara	99,89	99,56	99,72
Manado	99,35	99,90	99,63
Bitung	98,86	98,86	98,86
Tomohon	99,75	99,95	99,85
Sulawesi Utara	99,02	98,99	99,00

Sumber : Susenas 2006

Jika dilihat menurut jenis kelamin, angka melek huruf penduduk laki-laki pada tahun 2006 sebesar 99,02 persen sedikit lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan 98,99 persen. Kondisi ini juga berlaku di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Minahasa Utara. Hal ini berbeda dengan Bitung dimana angka melek huruf laki-laki maupun perempuan sama. Di kabupaten/kota lainnya angka melek huruf laki-laki sedikit lebih rendah dibanding perempuan.

Pada periode 2005-2006, terjadi kenaikan angka melek huruf di hampir semua kabupaten/kota di Sulawesi Utara, kecuali di Kabupaten Kepulauan Talaud. Hal ini dapat menunjukkan terjadinya perbaikan dalam sistem pendidikan yang diterapkan di kabupaten/kota tersebut. Jika dilihat per kabupaten/kota, angka melek huruf tertinggi terdapat di kota Tomohon yaitu sebesar 99,85 persen sedangkan yang terendah terdapat di Kabupaten Kepulauan Talaud sebesar 97,48 persen (gambar 3).

**Gambar 3. Angka Buta Huruf Per Kabupaten/kota di Sulawesi Utara, 2006**



Dunia pendidikan di Sulawesi Utara masih menghadapi banyak masalah, salah satunya adalah keluhan mengenai soal sarana dan prasarana pendidikan yang kurang memadai dan tenaga pengajar yang kurang berkualitas. Untuk itu berbagai cara dilakukan oleh pemerintah diantaranya dengan mengembangkan kurikulum, sehingga diharapkan dapat menciptakan lulusan yang lebih berkualitas yang dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia.

Sedangkan gambaran mengenai peningkatan SDM dapat dilihat dari kualitas tingkat pendidikan penduduk usia 10 tahun keatas yang sudah menamatkan sekolah. Sekitar setengah penduduk usia 10 tahun ke atas di Sulawesi Utara sudah menamatkan pendidikan minimal SLTP (52,38 %) dan sisanya adalah penduduk usia 10 tahun keatas yang tidak punya ijazah (21,02%) dan tamat SD (26,60%).

Bila dilihat menurut jenis kelamin, persentase laki-laki dan perempuan yang menamatkan pendidikan sampai dengan SLTP ke atas hampir sebanding. Namun secara umum, persentase laki-laki (52,47%) sedikit lebih banyak daripada persentase

perempuan (52,28%) yang menamatkan pendidikan SLTP ke atas. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan gender di bidang pendidikan di Sulawesi Utara hampir tidak ada. Kesempatan laki-laki maupun perempuan untuk berpartisipasi dalam bidang pendidikan hampir sama.

**Tabel 3.2 Persentase Penduduk 10 tahun keatas Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan tahun 2006**

Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/Belum Tamat SD	20,99	21,06	21,02
Sekolah Dasar	26,54	26,66	26,60
SLTP	22,44	22,42	22,43
Sekolah Menengah/SMU	21,19	20,00	20,60
SM Kejuruan	4,26	5,66	4,95
Diploma I/II	0,51	0,95	0,73
Diploma III/Sarmud	0,98	0,74	0,86
Diploma IV/S I	2,83	2,39	2,62
S2/S3	0,26	0,12	0,19
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber : Susenas 2006

### 3.2 Tingkat Partisipasi Sekolah

Untuk melihat seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan yang ada dapat dilihat dari persentase penduduk yang masih bersekolah pada umur tertentu yang lebih dikenal dengan angka partisipasi sekolah (APS). Meningkatnya angka partisipasi sekolah berarti menunjukkan adanya keberhasilan di bidang pendidikan, utamanya yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan.

Semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin rendah Angka Partisipasi Sekolah (APS). Pada tahun 2005, APS Sulawesi Utara pada anak usia 7-12 tahun mencapai 97,37 persen (Tabel 3.3). Pada anak usia 13-15 tahun, APS menurun menjadi sekitar 88 persen. Sementara kelompok usia 16-18 tahun lebih tajam lagi penurunannya menjadi sekitar 56 persen. Hal ini menunjukkan semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin banyak anak yang berhenti sekolah.

**Tabel 3.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Usia Sekolah Tahun 2006**

Usia Sekolah (Tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
7 – 12	96,13	98,66	97,37
13 – 15	86,77	89,27	88,01
16 – 18	51,24	38,79	55,84

Sumber : Susenas 2006

Berbeda dengan tingkat pendidikan yang ditamatkan, dimana persentase laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, pada usia pendidikan dasar (7-15 tahun) APS laki-laki lebih rendah daripada APS perempuan. Namun di usia 16-18 tahun APS perempuan lebih rendah daripada APS laki-laki.

### 3.3 Fasilitas Pendidikan

Semakin meningkatnya angka partisipasi sekolah, khususnya untuk jenjang pendidikan SD dan SLTP harus diikuti dengan meningkatnya fasilitas pendidikan, terutama mengenai daya tampung ruang kelas, sehingga program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan oleh pemerintah dapat berhasil. Guna mengatasi kekurangan daya tampung, pemerintah menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan seperti menambah pembangunan unit gedung baru dengan prioritas gedung yang rusak berat serta mengangkat guru kontrak untuk ditempatkan pada sekolah yang kekurangan guru.

Guru dan Sekolah merupakan faktor-faktor penentu keberhasilan dalam pendidikan. Tabel 3.4 menggambarkan rasio murid terhadap guru dan guru terhadap sekolah, yang merupakan suatu indikasi mulai efektifnya proses belajar mengajar

dalam dunia pendidikan. Dilihat dari jenjang pendidikan di Sulawesi Utara untuk tahun ajaran 2004-2005, rasio murid terhadap guru untuk tingkat SLTA adalah yang terkecil dibandingkan dengan jenjang pendidikan Sekolah Dasar dan SLTP. Di tingkat SD/MI, 1 orang guru mengawasi hampir sekitar 15 murid. Sedangkan untuk jenjang SLTP/MTs, 1 orang guru mengawasi 14 orang siswa dan untuk jenjang pendidikan SLTA/MA/SMK, 1 orang guru mengawasi hampir 14 orang siswa.

Bila dilihat dari rasio guru terhadap sekolah di setiap jenjang pendidikan, maka di jenjang pendidikan SD/MI distribusi tenaga guru lebih rendah dibandingkan dengan jenjang SLTP/MTs dan SLTA yaitu antara 6-7 orang guru dalam 1 Sekolah Dasar sedangkan untuk SLTP/MTs ada 10-11 guru dalam 1 sekolah SLTP/MTs dan ada 15 sampai 16 orang guru dalam 1 sekolah SLTA/MA/SMK.

**Tabel 3.4 Rasio Murid –Guru dan Guru-Sekolah tahun 2005/2006**

Jenjang Pendidikan	Rasio Murid terhadap Guru	Rasio Guru terhadap Sekolah
(1)	(2)	(3)
SD / MI	14,89	6,64
SLTP / MTs	14,06	10,80
SLTA / MA / SMK	13,50	15,72

Sumber : Sulut Dalam Angka 2006

## **4. TARAF DAN POLA KONSUMSI**

Berkurangnya jumlah penduduk miskin mencerminkan bahwa secara keseluruhan pendapatan penduduk meningkat, sedangkan meningkatnya jumlah penduduk miskin mengindikasikan menurunnya pendapatan penduduk. Dengan demikian jumlah penduduk miskin merupakan indikator yang cukup baik untuk mengukur tingkat kesejahteraan rakyat. Aspek lain yang perlu dipantau berkenaan dengan peningkatan pendapatan penduduk tersebut adalah bagaimana pendapatan tersebut terdistribusi di antara kelompok penduduk. Indikator distribusi pendapatan, walaupun didekati dengan pengeluaran, akan memberi petunjuk aspek pemerataan yang telah tercapai. Dari data pengeluaran dapat juga diungkapkan tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum dengan menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan.

### **4.1 Perkembangan Tingkat Kesejahteraan**

Determinan dari kesejahteraan ekonomi adalah kemampuan daya beli penduduk. Penurunan kemampuan daya beli akan mengurangi kemampuan pemenuhan kebutuhan pokok. Krisis ekonomi yang terjadi mulai pertengahan 1997 menyebabkan merosotnya kemampuan daya beli penduduk. Ini disebabkan peningkatan pengeluaran per kapita lebih rendah dibandingkan peningkatan laju inflasi yang mencapai sekitar 90 persen selama tahun 1997-1998. Walaupun sudah mulai menuju ke arah perbaikan, namun dampak krisis ekonomi ini ternyata masih terasa sampai saat ini, terlebih lagi dengan terus meningkatnya harga berbagai barang dan jasa

### **4.2 Pengeluaran Rumah Tangga**

Pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran keadaan kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi pendapatan maka porsi pengeluaran akan bergeser dari pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh,

sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai perubahan tingkat kesejahteraan.

Berdasarkan Tabel 4.1 terlihat bahwa persentase pengeluaran untuk makanan pada tahun 2005 lebih kecil daripada tahun 2002. Persentase pengeluaran untuk makanan pada tahun 2002 terhitung 60,19 persen turun menjadi 55,43 persen pada tahun 2005 sebaliknya persentase pengeluaran untuk bukan makanan pada tahun 2005 lebih tinggi dibandingkan tahun 2002. Ini menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk Provinsi Sulawesi Utara berangsur-angsur membaik. Tampaknya pengaruh krisis moneter yang pada akhirnya berkembang menjadi krisis ekonomi masih terasa pada tahun 2002 dimana lebih dari 60 persen pengeluaran digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan.

**Tabel 4.1 Pengeluaran Rata-rata (Rp) Nominal dan Persentase Pengeluaran Makanan dan Bukan Makanan selama Sebulan**

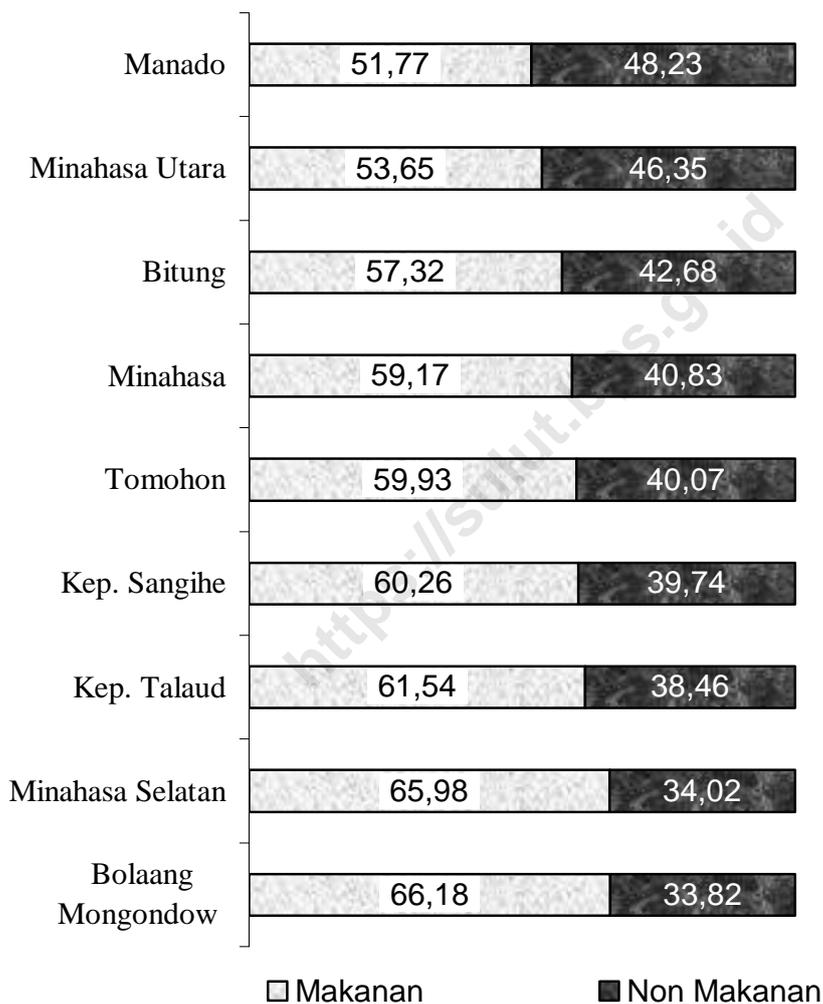
Jenis Pengeluaran	Pengeluaran Per Kapita Sebulan			
	Nominal		Persentase	
	2002	2005	2002	2005
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Makanan	132.879	158.139	60,19	55,43
Non Makanan :				
Perumahan	38.104	59.993	17,26	21,03
Barang dan Jasa	21.961	41.001	9,95	14,37
Pakaian	13.276	10.623	6,01	3,72
Barang Tahan Lama	8.183	8.813	3,71	3,09
Lainnya	6.377	6.747	2,88	2,36
Jumlah	220.780	285.316	100,00	100,00

Sumber : Susenas 2002, 2005

Gambar 4 memperlihatkan besarnya pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan menurut kabupaten/kota. Di Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa Utara dan Kabupaten Minahasa, antara 50-60 persen pendapatan

perkapita penduduknya digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanannya. Di kabupaten lainnya persentase tersebut malah lebih besar, berkisar antara 60-70 persen. Persentase pengeluaran penduduk untuk non makanan tertinggi di Kota Manado dan Kabupaten Minahasa Utara. Ini menyiratkan secara rata-rata tingkat kesejahteraan di kedua wilayah itu merupakan yang terbaik di Sulawesi Utara.

**Gambar 4. Distribusi Persentase Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Makanan dan Non Makanan Menurut Kabupaten/Kota Sulawesi Utara, 2005**



## 5. PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

Manusia dan alam lingkungannya baik lingkungan fisik maupun sosial merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Lingkungan fisik bisa berupa alam sekitar yang alamiah dan yang buatan manusia. Untuk mempertahankan diri dari keganasan alam, maka manusia berusaha membuat tempat perlindungan, yang pada akhirnya disebut rumah atau tempat tinggal. Manusia sebagai makhluk sosial selalu ingin hidup bersama dengan orang lain dan berinteraksi antara satu dengan lainnya, sehingga satu persatu bangunan rumah tinggal bermunculan sampai terbentuk suatu pemukiman rumah penduduk.

Sepanjang kehidupannya, manusia selalu membutuhkan rumah yang merupakan salah satu kebutuhan pokok hidupnya selain sandang dan pangan. Dengan kata lain, rumah merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi untuk dapat terus bertahan hidup. Apabila rumah sebagai salah satu kebutuhan pokok tersebut tidak dapat tersedia, maka manusia akan sulit untuk hidup secara layak.

Manusia membutuhkan rumah disamping sebagai tempat untuk berteduh dan berlindung dari hujan maupun panas, rumah juga diperlukan untuk memberi rasa aman penghuninya dari gangguan yang tidak diinginkan. Rumah menjadi tempat berkumpul bagi para penghuni rumah yang biasanya merupakan satu ikatan keluarga. Rumah dapat dijadikan sebagai salah satu indikator bagi kesejahteraan pemiliknya. Semakin baik fasilitas yang dimiliki, dapat diasumsikan semakin sejahtera rumahtangga yang menempati rumah tersebut. Berbagai fasilitas yang dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan tersebut antara lain dapat dilihat dari luas lantai rumah, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar rumahtangga dan juga tempat penampungan kotoran terakhir.

Dalam Susenas 2006, pertanyaan mengenai perumahan tidak ditanyakan secara rinci seperti tahun-tahun sebelumnya. Sehingga analisis mengenai kondisi perumahan dan lingkungan hanya terbatas pada luas lantai rumah, sumber air minum, ketersediaan fasilitas buang air besar, dan jarak ke penampungan kotoran/tinja.

## 5.1 Kualitas Rumah Tinggal

Rumah merupakan tempat berkumpul bagi semua anggota keluarga sebagai tempat untuk menghabiskan sebagian besar waktu mereka, sehingga kondisi kesehatan perumahan juga sangat terkait erat dengan kondisi kesehatan setiap anggota keluarga maupun tetangga sekitar. Bila kondisi perumahan sehat, tentunya peluang setiap anggota rumahtangga untuk memiliki kondisi tubuh yang sehat juga sangat besar. Namun sebaliknya, jika kondisi rumah tidak sehat maka potensi terjadi penularan penyakit juga sangat besar.

Salah satu ukuran yang digunakan untuk menilai kesehatan perumahan diantaranya adalah luas lantai rumah/tempat tinggal. Luas lantai rumah tempat tinggal selain digunakan sebagai indikator untuk menilai kemampuan sosial masyarakat, secara tidak langsung juga dikaitkan dengan sistem kesehatan lingkungan keluarga atau tempat tinggal (perumahan). Luas lantai erat kaitannya dengan tingkat kepadatan hunian atau rata-rata luas ruang untuk setiap anggota keluarga.

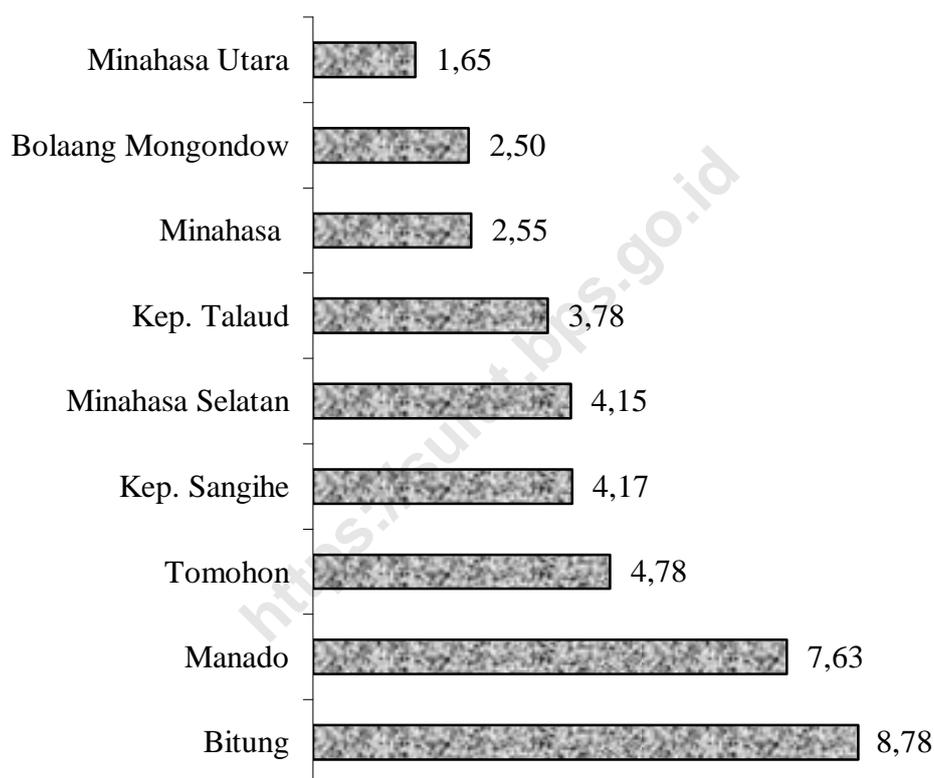
Pada tahun 2006 tercatat 4,38 persen rumah tangga di Sulawesi Utara yang tinggal di rumah yang relatif sempit, yaitu kurang dari 20 m<sup>2</sup> per rumah tangga. Hal ini berarti terjadi peningkatan dibanding tahun 2005 dimana persentasenya sebesar 2,91 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi kesehatan perumahan cenderung menunjukkan adanya penurunan.

**Tabel 5.1 Persentase Rumahtangga menurut Indikator Kualitas dan Fasilitas Perumahan Tahun 2005 – 2006**

Indikator	2005	2006
(1)	(2)	(3)
Kualitas		
Luas Lantai < 20 m <sup>2</sup>	2,91	4,38
Fasilitas		
Sumber Air Minum Leding & Kemasan	29,00	32,17
Memiliki Jamban Sendiri	67,49	64,74

Jika dilihat per kabupaten/kota pada Gambar 5, masih ada sebanyak 8,78 persen rumahtangga di Bitung yang tinggal di rumah yang mempunyai luas kurang dari 20 m<sup>2</sup>. Dalam hal ini jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain, Kota Bitung merupakan kabupaten/kota dengan persentase terbesar. Persentase terkecil rumah tangga yang mempunyai luas lantai rumah kurang dari 20 m adalah Kabupaten Minahasa Utara (1,65%).

**Gambar 5 . Persentase Rumah Tangga dengan Luas Lantai Rumah < 20 m<sup>2</sup>, 2006**

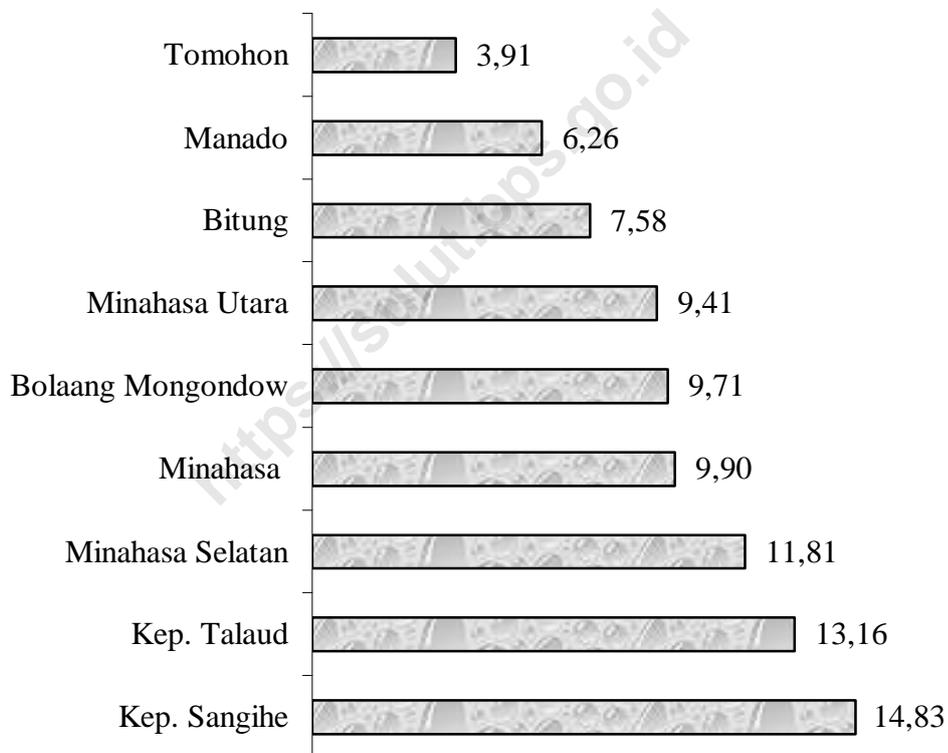


Selain luas lantai, jenis lantai juga dapat digunakan sebagai indikator untuk melihat kualitas perumahan. Semakin baik kualitas lantai perumahan dapat diasumsikan semakin membaik tingkat kesejahteraan penduduknya. Rumahtangga dengan jenis lantai keramik atau marmer mempunyai tingkat kesejahteraan yang lebih baik daripada rumahtangga yang mempunyai jenis lantai semen, ubin atau tanah. Selain itu, jenis lantai juga dapat mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat. Semakin banyak rumahtangga yang mendiami rumah dengan lantai tanah akan berpengaruh pada rendahnya derajat kesehatan masyarakat. Karena lantai tanah dapat

menjadi media yang subur bagi timbulnya kuman penyakit dan media penularan bagi jenis penyakit tertentu, seperti penyakit diare, cacangan dan penyakit kulit.

Indikator kualitas perumahan yang lain diantaranya adalah rumahtangga dengan atap yang layak (tidak beratap dedaunan) dan dinding permanen. Sebagian besar masyarakat di Sulawesi Utara tinggal di rumah yang beratap seng. Data tahun 2006 menunjukkan bahwa terdapat antara 8 sampai 9 dari 10 rumahtangga yang tinggal di rumah yang beratapkan seng. Demikian juga dinding, sebanyak 60,08 persen rumahtangga di Sulawesi Utara rumahnya berdinding terluas tembok.

**Gambar 6 . Persentase Rumah Tangga yang Berlantai Tanah, 2006**



Kelengkapan fasilitas pokok suatu rumah akan menentukan nyaman atau tidaknya suatu rumah tinggal, yang juga menentukan kualitas suatu rumah tinggal. Fasilitas pokok yang penting agar suatu rumah menjadi nyaman dan sehat untuk ditinggali adalah tersedianya sarana penerangan listrik, air bersih serta jamban dengan tangki septik.

Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumahtangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah.

Pada tahun 2006, rumahtangga di Sulawesi Utara yang menggunakan air leding dan air kemasan baru mencapai 32,17 persen. Bila dibandingkan dengan tahun 2005 ada peningkatan sebesar 3 persen. Walaupun terjadi peningkatan, penanganan masalah ini sangat membutuhkan peran pemerintah terutama bagi instansi terkait agar lebih memperhatikan kebutuhan air minum yang bersumber dari air leding tersebut.

Sumber air bersih yang lain adalah dari pompa dan sumur/mata air terlindung. Jarak yang ideal antara pompa dan sumur/mata air terlindung ke tempat pembuangan limbah adalah lebih dari 10 m. Yang dimaksud dengan jarak disini adalah jarak sumber air minum dengan tempat pembuangan limbah terdekat. Tempat pembuangan limbah terdekat dalam hal ini bisa milik rumahtangga itu sendiri, bisa juga milik tetangga sekitar. Pada tahun 2006 tercatat sebesar 46,49 persen rumahtangga pengguna air bersih yang bersumber dari pompa dan sumur/mata air terlindung yang berjarak lebih dari 10 m ke tempat pembuangan limbah. Hal ini berarti terjadi peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2005, dimana terdapat 40,07 persen rumahtangga dari seluruh rumahtangga di Sulawesi Utara yang sumber mata airnya berjarak >10 meter dari tempat pembuangan limbah.

Sistem pembuangan kotoran/air besar manusia sangat erat kaitannya dengan kondisi lingkungan dan resiko penularan suatu penyakit, khususnya penyakit saluran pencernaan. Klasifikasi sarana pembuangan kotoran dilakukan berdasarkan atas tingkat resiko pencemaran yang mungkin ditimbulkan. Masalah kondisi lingkungan tempat pembuangan kotoran manusia tidak terlepas dari aspek kepemilikan terhadap sarana yang digunakan terutama dikaitkan dengan tanggungjawab dalam pemeliharaan dan kebersihan sarana. Fasilitas rumah tinggal yang berkaitan dengan hal tersebut adalah ketersediaan jamban sendiri dengan tangki septik. Di Sulawesi Utara, masih terdapat kurang dari 50 persen dari total rumahtangga yang tempat pembuangan tinjanya adalah tangki septik, yaitu hanya sebesar 46,39 persen dan sebanyak 64,74 persen rumahtangga yang memiliki jamban sendiri. Hal-hal tersebut di atas merupakan suatu gambaran betapa perlunya membuka kesadaran masyarakat tentang pentingnya fasilitas-fasilitas tersebut untuk kesehatan lingkungan.